

ANALISIS DESKRIPTIF PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2012

(Suatu Kajian dalam Penyusunan Masterplan Pendidikan
Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2012)

Akhmad Fathurohman¹, Enny Winaryati², Siti Hidayah³

¹Program Studi Statistika FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.

¹Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang.

¹STIE Dharma Putra Semarang

akhmadfathur@gmail.com

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan untuk berlangsungnya pendidikan sehingga sesuai dengan standar kualitas pendidikan nasional. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan sebagai baseline perencanaan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Blora. Metode yang digunakan adalah survey yang mengambil sampel yang representatif di seluruh kecamatan se Kabupaten Blora yang di konsentrasikan di empat wilayah yaitu wilayah Ngawen, Randublatung, Blora, dan Cepu, dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Simpulan dari kajian ini adalah: (a) Pembiayaan pendidikan masih bertumpu pada pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi, di samping itu juga dukungan pembiayaan pendidikan dari dunia usaha dan industri serta perusahaan asing masih relatif rendah, (b) ketepatan waktu pencairan dinilai tidak sesuai dengan kalender pendidikan; (c) kebutuhan tertinggi pembiayaan pendidikan adalah untuk sarana prasarana dan program kurikulum, serta secara khusus untuk pengembangan keterampilan/vokasi pada bagi SMK, (d) pemenuhan pembiayaan untuk mencapai standar pembiayaan masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi (a) perlu ada upaya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan sehingga mendukung semua satuan pendidikan mencapai Standar Nasional, (b) waktu pencairan biaya pendidikan perlu tepat waktu sesuai dengan kalender pendidikan, (c) Perlu peningkatan dukungan dari DU/I dan perusahaan asing, (e) pembiayaan untuk sarana dan prasarana perlu diprioritaskan.

Kata Kunci: Pembiayaan, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional menghendaki sistem pendidikan yang terdesentralisasi di satu

sisi, namun di sisi lain juga menghendaki perlunya pendidikan nasional yang berstandar. Kebijakan desentralisasi memberikan peluang desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan kapasitas daya dukung dan kekhususan masing-

masing penyelenggara. Di sisi lain, standarisasi dimaksudkan untuk menjaga mutu pendidikan agar memenuhi standar nasional pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pada dasarnya SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat. Standar Nasional Pendidikan merumuskan standar isi (kurikulum), proses, kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Standar-standar itulah yang menjadi acuan dasar dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk juga harus diacu oleh daerah-daerah dalam merencanakan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sejalan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat serta mengantisipasi penyebaran mutu yang tidak seimbang antar

daerah. Guna memenuhi harapan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Standar Pelayanan Minimal tersebut merupakan acuan dasar dan normatif yang memuat kriteria dan persyaratan minimal penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan: (1) menetapkan standar kualitas pelayanan minimal lembaga penyelenggara pendidikan secara nasional yang merupakan bagian integral dari standar nasional pelayanan pendidikan; (2) memberi acuan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pendidikan; dan (3) menyediakan tolok ukur penilaian kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan baik yang dilakukan secara eksternal oleh lembaga akreditasi yang berwenang maupun secara internal sebagai evaluasi diri oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dari dasar tersebut di atas, maka segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan harus

mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam konteks daerah Kabupaten Blora, salah satu misi Kabupaten Blora berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Blora yang maju dan sejahtera, berdaya saing, sehat, dan berpendidikan memadai dalam kehidupan ekonomi yang berkualitas, demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Blora yang *wareg, waras* dan *wasis*. Tiga hal tersebut sejatinya adalah tiga bidang utama dalam kehidupan masyarakat, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Upaya untuk mewujudkan misi tersebut ditempuh dengan 9 (sembilan) kebijakan, antara lain adalah: kualitas pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pemerataan kesempatan belajar, baik melalui jalur formal maupun non formal, meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat), serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas pengembangan sistem pendidikan di Kabupaten Blora merupakan suatu

sistem tidak dapat terlepas dari perencanaan yang terstruktur baik, mulai dari tinjauan aspek keuangan maupun aspek sistem pembelajaran. Dengan demikian perencanaan terstruktur tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Standar pembiayaan merupakan faktor utama sebagai pendukung dapat berjalannya sistem pendidikan, untuk menyiapkan semua satuan pendidikan berstandar nasional diperlukan biaya yang memadai sehingga semua kebutuhan pembiayaan pendidikan tercukupi sesuai standarnya.

Tujuan Kajian

Mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan sebagai baseline perencanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Blora sesuai standar nasional.

Adapun sasaran dari penyusunan standar pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan Kab. Blora ini adalah:

- a. Identifikasi data pembiayaan pendidikan di Kabupaten Blora ditinjau dari standar pembiayaan pendidikan.
- b. Analisis permasalahan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Blora ditinjau standar pembiayaan pendidikan.

- c. Sumber pendanaan dalam pembiayaan pendidikan Kabupaten Blora.

Standar Pembiayaan Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Pengaturan standar pembiayaan ditemukan hanya pada Pasal 62, di mana disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi (penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber

daya manusia, dan modal kerja tetap), biaya operasi (gaji, tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan, biaya tak langsung), dan biaya personal (biaya oleh peserta didik).

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
- b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan sampel dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Diharapkan dengan metode ini tujuan-tujuan yang akan dicapai harus dapat menggambarkan karakteristik pembiayaan pendidikan di Kabupaten Blora dapat diketahui secara umum. Langkah-langkah kajian yang dilaksanakan sesuai dengan Singarimbun (1989: 3), dalam suatu penelitian survai langkah-langkah lazim ditempuh adalah sebagai berikut :

- (a) Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survey,
- (b)

menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan, hipotesis tidak dirumuskan karena merupakan kajian operasional, pengelolaan pembiayaan pendidikan yang sedang berlangsung pada setiap satuan pendidikan di Kabupaten Blora, (c) Pengambilan sampel. (d) Pembuatan Instrumen Penelitian/kuesioner, (e) Pekerjaan lapangan, Pengambilan data melalui kuisisioner dan diskusi terbatas dan wawancara dengan para responden, (f) Pengolahan data, (g) analisis, dan (h) pelaporan (uji publik) dan seminar hasil kajian.

Tabel 1 Daftar Satuan Pendidikan Sampel Kajian

Sekolah	Standar Kualitas Sekolah			Jumlah
	Rintisan SSN	SSN	RSBI/SBI	
SD/MI	120	16	0	136
SMP/MTs	40	12	3	55
SMA/MA	12	4	1	17
SMK	8	4	2	14
Total	180	36	6	222

Sebaran satuan pendidikan (sekolah) yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Kecamatan Ngawen (Japah, Ngawen, Kunduran, Todanan); (2) Blora (Jepon, Blora, Banjarejo, Bogorejo, Tunjungan); (3) Kecamatan Randublatung (Jati, Randublatung, Kradenan); dan (4) Kecamatan Cepu (Cepu, Sambong, Jiken, Kedungtuban). Karakteristik pendidikan di empat Kecamatan tersebut minimal diasumsikan cukup merepresentasikan varian kondisi pendidikan di Kabupaten

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah se Kabupaten Blora, yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK. Adapun sampel satuan pendidikan di Kabupaten Blora dalam kajian ini adalah dibedakan dengan kualitas sekolah sesuai dengan standar nasional yaitu Sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN) yang merupakan sekolah belum SSN, sekolah sudah SSN, sekolah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Blora secara umum. Asumsi dasar inilah yang dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa hasil kesimpulan pada empat daerah sampel tersebut cukup mewakili daerah-daerah lain di Kabupaten Blora.

Data penelitian kebijakan ini dikumpulkan menggunakan metode wawancara, pengisian kuesioner dan *Focus Discussion Group* (FGD) dengan instrumen standar yang telah dikembangkan agar diperoleh data yang lebih komprehensif. Panduan FGD dikem-

bangkan berdasarkan kuesioner/angket yang diisi responden.

Data penelitian dikumpulkan dari sumber data primer target dalam penelitian kebijakan ini, yakni para guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang telah memperoleh sertifikat pendidik, kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Sumber data sekunder berupa data dokumenter data-data pembiayaan pendidikan selama ini berlangsung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti logika pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu melalui analisis deskriptif dari data hasil isian kuesioner secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan deskripsi atau penjabaran berdasarkan pada hasil analisis kuantitatif tersebut dan hasil dari FGD dan wawancara. Dengan demikian analisis data dilakukannya melalui dua tahap, yaitu: analisis deskripsi data kuantitatif dari kuesioner yang telah didapatkan dari lapangan, dan analisis substansi berdasarkan data kuantitatif dipadu dengan data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan FGD.

Berdasarkan pada analisis data kuantitatif yang dipadu dengan data dan informasi kualitatif dari hasil FGD dan

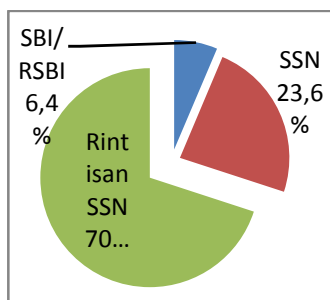
wawancara, kemudian ditarik kesimpulan dengan memfokuskan pada upaya untuk menjawab 3 (tiga) fokus penelitian ini, yaitu: (1) standar pengelolaan pendidikan; (2) standar pembiayaan pendidikan; dan (3) standar penilaian pendidikan.

Rekomendasi dirumuskan berdasarkan pada kesimpulan yang diambil dari tiga fokus utama dalam penelitian ini yang tujuan utamanya adalah untuk menyusun standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan di Kabupaten Blora yang tepat. Rekomendasi yang disusun menjadi bahan rujukan dan pedoman untuk membangun dan menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Blora yang efektif dan efisien, yang dalam peningkatan kualitas fasilitas pendidikan akan disinergikan dengan kebijakan pembangunan tata ruang di Kabupaten Blora, yang semuanya harus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

HASIL PENELITIAN

Gambaran umum satuan pendidikan sampel kajian ini adalah dari semua jenjang satuan pendidikan yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang di klasifikasi menurut jenisnya yaitu Sekolah Berstandar Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), Sekolah Standar Nasional (SSN), dan

sekolah Rintisan Sekolah Standar Nasional (Rintisan SSN), adapun persentase datanya seperti pada gambar berikut.

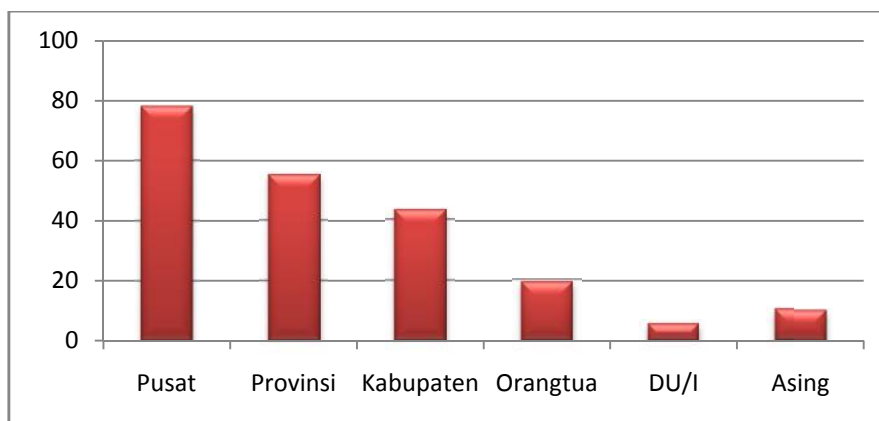


Gambar 1. Persentase Sample Satuan Pendidikan Sesuai dengan Jenisnya

Data tersebut menunjukkan juga bahwa di Kabupaten Blora pada umumnya sekolah-sekolah masih belum berstandar nasional.

1. Komitmen Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pembiayaan

Komitmen pemerintah pusat dalam pembiayaan pendidikan menurut responden adalah dinilai tinggi dengan



Gambar 2. Komitmen Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan jelas masih bertumpu pada komitmen pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten.

persentase mencapai 78,0% yang menilai rendah hanya 22,0%, komitmen pemerintah provinsi responden yang menilai tinggi sebanyak 55,0%, yang menilai rendah dan yang menilai rendah sebanyak 45,5%. Untuk komitmen pemerintah kabupaten Blora dinilai rendah oleh responden mencapai 56,9%, sedangkan yang menilai tinggi hanya 43,1%.

Komitmen orang tua dalam pembiayaan pendidikan menurut responden dinilai rendah dengan persentase mencapai 80,7%, dunia usaha dan industri juga komitmennya rendah 94,5%, dan dukungan asing juga sangat rendah 89,9%.

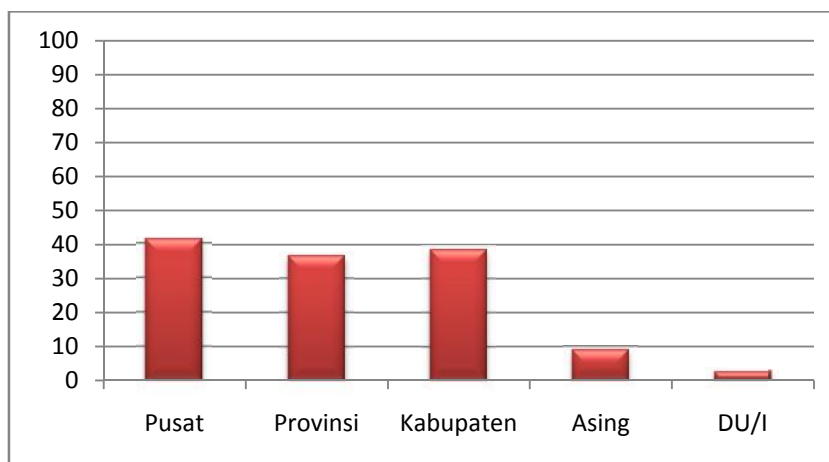
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut.

2. Ketersediaan Akses Informasi

Akses informasi secara umum masih dinilai rendah baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Responden yang

menilai tinggi untuk akses informasi dari pemerintah pusat hanya sebesar 41,3%, pemerintah provinsi 36,7%, pemerintah kabupaten hanya 38,6%, bantuan asing hanya 9,1%, dan dunia usaha dan industri

hanya 2,7%. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ketersediaan akses informasi pembiayaan pendidikan sampai di sekolah dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 3. Persentase akses informasi pembiayaan pendidikan

3. Keterbacaan Pedoman dan Fungsi Pembiayaan Pendidikan

Tingkat keterbacaan akses informasi pembiayaan masih dinilai rendah oleh responden sebesar 80,36%, dan yang menilai tinggi hanya 19,64%.

Fungsi pembiayaan tetap bertumpu pada pembiayaan dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Sedangkan fungsi pembiayaan dari orang tua, dunia usaha/industri maupun asing dinilai rendah.

4. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan yang masih dinilai rendah adalah masalah ketepatan pencairan yang di nilai rendah oleh sebanyak 50,4%, sementara itu untuk kemudahan persyaratan administrasi, kecepatan

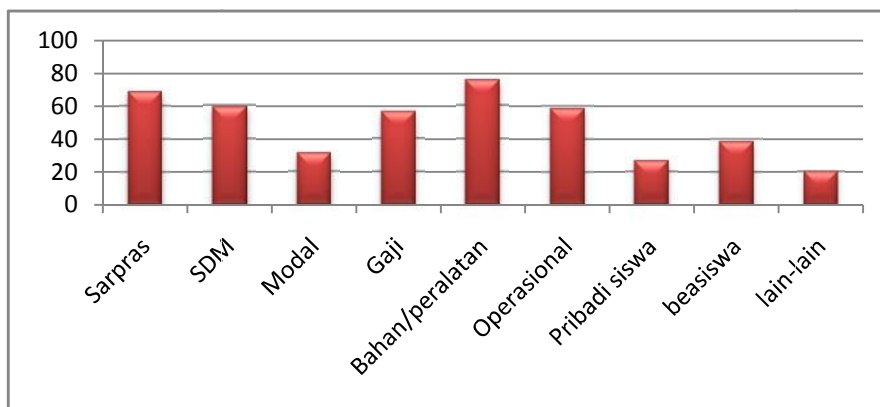
pencairan, keterlibatan komite sekolah, guru, dan kepala sekolah dalam merealisasi pembiayaan pendidikan dinilai tinggi oleh lebih dari 50% responden.

5. Pemanfaatan Pembiayaan

a. Biaya Dari Pemerintah Pusat

Secara umum biaya dari pemerintah merupakan tumpuan pembiayaan pendidikan terutama untuk membiayai sarana-prasarana, pengembangan SDM, gaji, pahan/peralatan pendidikan dan biaya operasional, hal ini dibuktikan dengan pandangan responden yang menilai tinggi pada permasalahan tersebut dengan penilaian di atas 55%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut, tinggi rendahnya pemanfaatan

pembiayaan dari sumber pemerintah pusat.

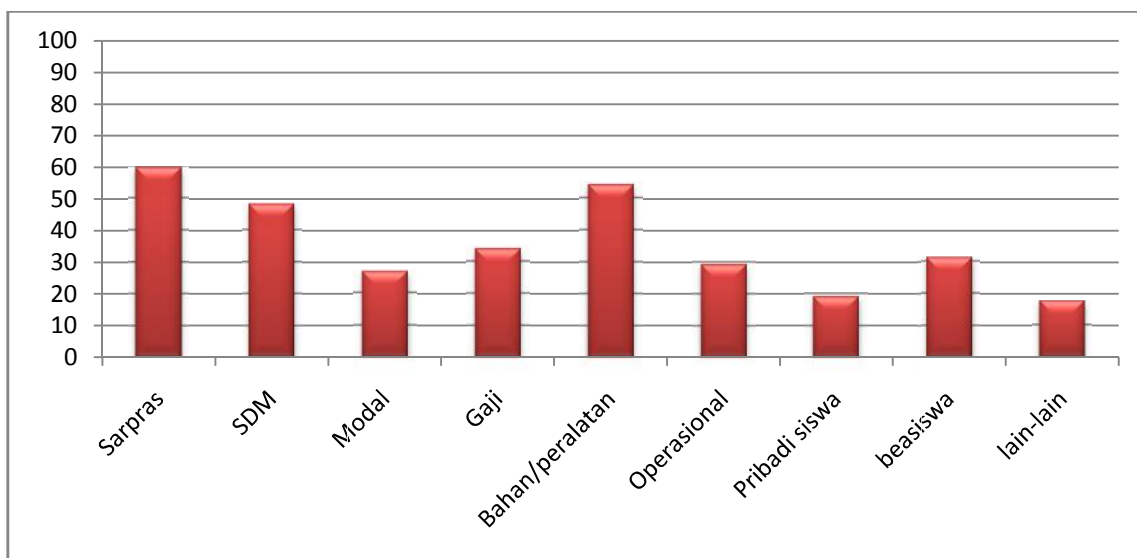


Gambar 4. Pemanfaatan biaya daripemerintah pusat

b. Biaya dari pemerintah propinsi

Biaya pendidikan dari pemerintah provinsi menurut responden yang dinilai tinggi pemanfaatannya untuk biayai sarana dan prasarana dan membiayai

bahan/peralatan pendidikan habis pakai. Sedangkan pemanfaatan untuk biaya yang lainnya dinilai rendah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 5. Pemanfaatan biaya daripemerintah provinsi

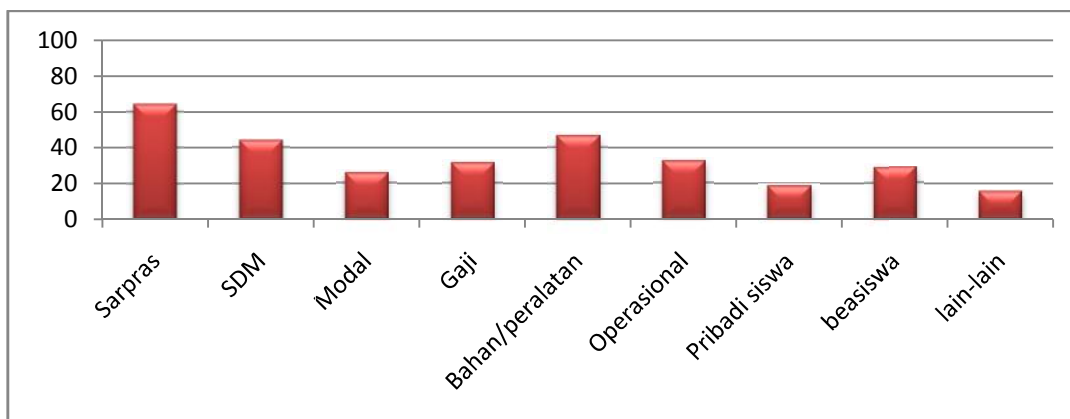
c. Pemanfaatan Biaya dari Pemerintah Kabupaten

Pemanfaatan biaya dari sumber pemerintah kabupaten menurut responden

adalah untuk membiayai sarana dan prasarana dengan persentase mencapai 64,2%

Sementara itu untuk biaya yang lainnya dinilai rendah dengan persentase lebih dari 50%. Perhatikan grafik di

bawah ini yang menggambarkan tinggi rendahnya pemanfaatan biaya dari sumber pemerintah Kabupaten.

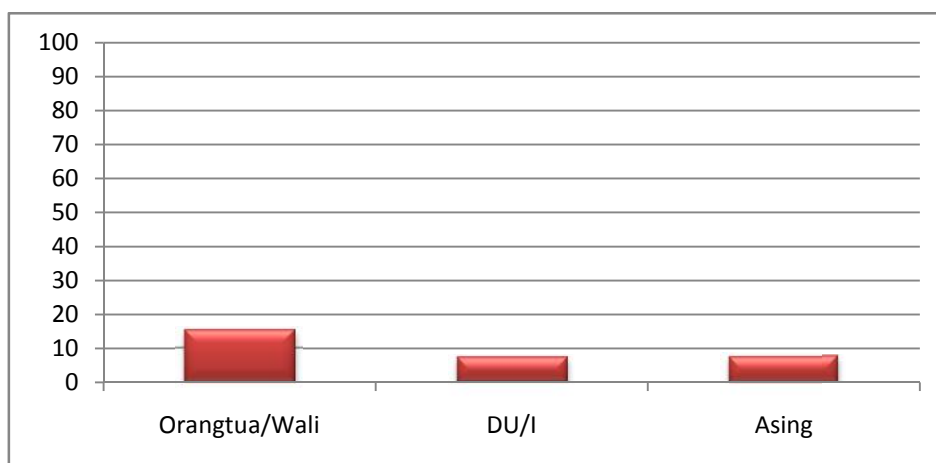


Gambar 6. Pemanfaatan biaya dari pemerintah kabupaten

d. Pemanfaatan Biaya dari Orangtua/wali, Dunia Usaha/Industri dan Bantuan Asing

Nampaknya di Kabupaten blora pemanfaatan biaya dari orangtua/wali, dunia usaha/industri dan bantuan asing untuk sembilan komponen seperti di atas adalah dinilai rendah karena memang pemasukan dananya dari ke tiga sumber

tersebut rendah juga. Rata-rata persentase pendapat responden untuk pemanfaatan dana pada sembilan komponen pembiayaan. Persentase tingginya pemanfaatan dana dari sumber orangtua/wali, dunia Usaha dan Industri, dan bantuan aing masih sangat rendahdi bawah 16%.



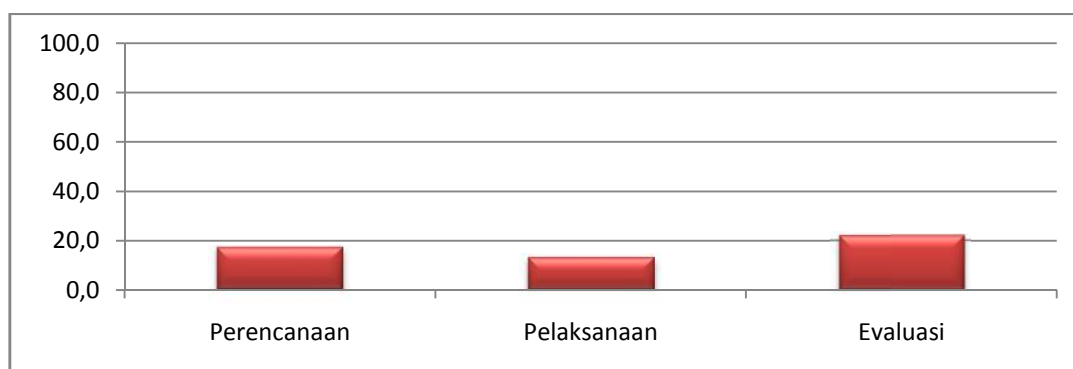
Gambar 7. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/inudstri, dan asing

6. Peran masyarakat dalam proses manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah.

Perenserta masyarakat dalam pembia-yaan pendidikan pada sembilan komponen pembiayaan Sarana-prasarana:

Pengembangan SDM, Modal kerja tetap, Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan, Bahan/peralatan pendidikan habis pakai, Biaya operasional pendidikan tak langsung, Biaya pribadi peserta didik, dan Beasiswa dinilai oleh responden sangat rendah, responden yang

menilai tinggi kurang dari 23% baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan adalah seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 8. Pemanfaatan biaya dari orang tua/wali, dunia usaha/industri, dan asing

7. Kendala dalam Pembiayaan Pendidikan

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan menurut responden tidak ada kendala yang tinggi baik itu, rata-rata persentase kendala yang dihadapi kurang dari 40%. Kendala yang dinilai cukup tinggi hanya kendala akses dan birokrasi dengan persentasi mencapai 39,7%, sementara itu kendala perencanaan dan dukungan hanya 35,4%, kendala pelaksanaan dan evaluasi sebesar 25,4%, kendala regulasi 35,2%

Kendala yang dinilai cukup tinggi dengan persentase lebih dari 40% hanya kendala akses informasi pembiayaan, perencanaan dalam penentuan kebutuhan biaya, dan kendala dalam penentuan rasio

(perbandingan) biaya antar aspek/ bidang yang akan dibiayai, dan kendala dalam pembuatan laporan keuangan, sedangkan kendala yang lainnya yang menilai tinggi kurang dari 40%.

8. Kebutuhan Pembiayaan

Rata-rata kebutuhan biaya setiap satuan pendidikan setiap tahun adalah sebesar Rp. 600.120.313, untuk 12 (dua belas) komponen pembiayaan, yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,9%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 14,1%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 6,6%, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,6%, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat / Sosialisasi Pendidikan 9,8% , Program Peningkatan

Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8,0%, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7,3%, Program Kurikulum 11,4%, Biaya Pengembangan Media Belajar dan Pendukung Pembelajaran 5,5% Program Kegiatan Kesiswaan 4,5%, Program Praktek Kerja Industri 3,6%, dan Pengembangan Keterampilan/Vokasi 11,8%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan biaya paling tinggi adalah program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mencapai 14,1%, selanjutnya untuk biaya kurikulum sebesar 11,4% dan khusus SMK biaya pengembangan keterampilan/vokasi sebesar 11,8%.

9. Rata-rata penerimaan biaya pendidikan pada setiap satuan pendidikan

Rata-rata penerimaan biaya pendidikan selama ini pada setiap satuan pendidikan pada setiap tahun adalah Rp. 288.102.847, dana dari pemerintah pusat mendominasi mencapai 60,6%, dari orang tua/wali sebesar 20,2%, pemerintah provinsi 9,4%, pemerintah kabupaten 5,9% dan penerimaan yang lainnya kurang dari 3,1%.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal setiap satuan pendidikan sesuai standar nasional setiap tahun sebesar **Rp. 600.120.313** maka pemenuhan biaya

pendidikan di Kabupaten Blora baru mencapai 48,0%. Sehingga untuk mencapai standar nasional pendidikan harus diupayakan pemenuhan kebutuhan biaya sebesar 52,0%.

10. Biaya Pribadi Peserta Didik

Biaya pribadi peserta didik yang harus dipersiapkan orang tua rata-rata adalah biaya transportasi pulang pergi dari rumah ke sekolah setiap hari Rata-rata adalah Rp. 5.711,43, untuk pakaian seragam setiap tahun (umumnya 4 stel) rata-rata Rp. 308.467,74, buku tulis, bulpoint pensil, penggaris, tas sekolah dan sejenisnya pertahun rata-rata Rp. 264.180,00, sumbangan insidental kepada sekolah per tahun rata-rata Rp. 225.091,06, kursus/les di luar sekolah rata-rata sebesar Rp 504.022,02 dan uang saku/jajan di sekolah setiap hari rata-rata Rp 3.895,74.

SIMPULAN

Simpulan dari kajian ini adalah:
(a) Dalam pembiayaan pendidikan komitmen pemerintah kabupaten Blora masih dinilai rendah, biaya pendidikan sekarang masih bertumpu pada pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi, di samping itu juga dukungan pembiayaan pendidikan dari dunia usaha dan industri

serta perusahaan asing di Kabupaten Bora masih sangat rendah, (b) dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan yang masih menjadi permasalahan adalah ketepatan waktu pencairan dinilai tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga kadang mengganggu karena tidak seiring dengan kalender pendidikan; (c) kebutuhan tertinggi pembiayaan pendidikan adalah untuk sarana prasarana dan program kurikulum, serta secara khusus untuk pengembangan keterampilan/vokasi pada bagi SMK, (d) pemenuhan pembiayaan untuk mencapai standar pembiayaan sehingga mencapai standar nasional di Kabupaten Bora masih relatif rendah.

REKOMENDASI

Selanjutnya direkomendasikan (a) perlu ada upaya peningkatan komitmen pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bora dalam pembiayaan pendidikan sehingga mendukung semua satuan pendidikan mencapai Standar Nasional, (b) waktu pencairan biaya pendidikan perlu diupayakan tepat waktu sesuai jadwal terutama terkait dengan kalender pendidikan, (c) Perlu diupayakan dukungan dari Dunia Usaha/Industri dan Perusahaan

Asing yang ada di Kabupaten Bora untuk mendukung dalam pembiayaan pendidikan, (e) pembiayaan untuk sarana dan prasarana perlu diprioritaskan sehingga segera terpenuhi sesuai Standar Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2012. *Blora Dalam Angka Tahun 2011*.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bora. 2012. *Profil Pendidikan Kabupaten Bora Tahun 2011/2012*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang *Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)*.
- PP 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- Santosa, Purbayu Budi dan Hamdani, Muliawan. 2007. *Statistika Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Erlangga.
- Singarimbun, Nasri dan Sofian Efendi, (Penyunting). 1982. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, CV. Rasma Agung.